

**UPAYA DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA DI FORA
INTERNASIONAL TERKAIT ISU PAPUA MERDEKA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh:

**MUHAMMAD CHAIRUL FERDIANT
07041381823163**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2023**

PALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diplomasi Publik Indonesia di Fora Internasional Terkait Isu Papua
Merdeka

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1

Oleh :

Muhammad Chairul Ferdiant

07041381823163

Pembimbing I

1. Dr. Zulfikri Saleman, MA

NIP. 195907201985031002

Tanda Tangan



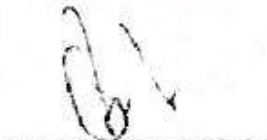
Tanggal

13-12-2022

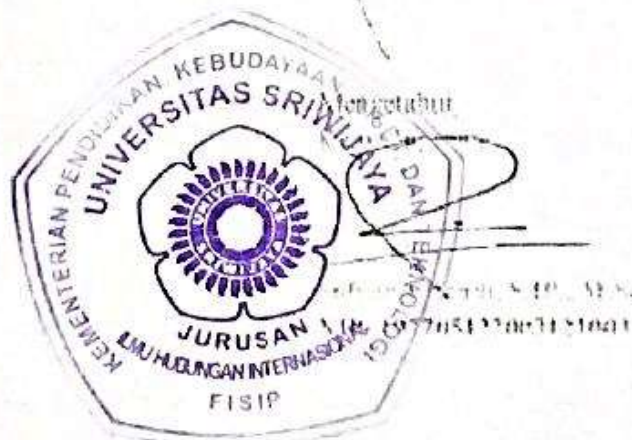
Pembimbing II

2. Ferdiansyah Rivali, S.Pd, MA

NIP. 198904112019031013



13-12-2022



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**Upaya Diplomasi Publik Indonesia di Fora Internasional Terkait Isu
Papua Merdeka**

Skripsi

Oleh :

Muhammad Chairul Ferdiant

07041381823163

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal **5 Januari 2023**

Pembimbing :

1. Dr. Zulfikri Suleman, MA

NIP. 195907201985031002

2. Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA

NIP. 198904112019031013

Penguji :

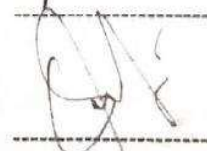
1. Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si.

NIP. 198708192019031006

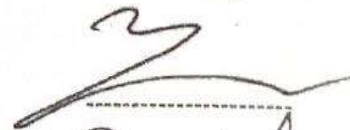
2. Gunawan Lestari Elake, S.I.P., M.A

NIP. 198405182018031001

Tanda Tangan

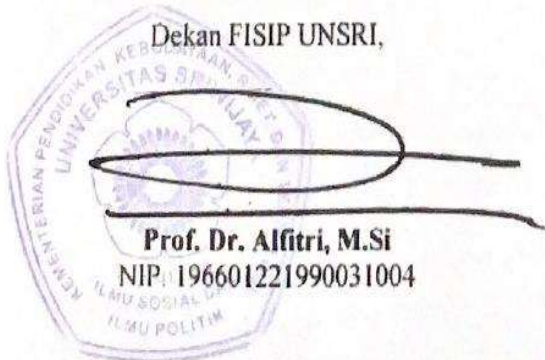


Tanda Tangan



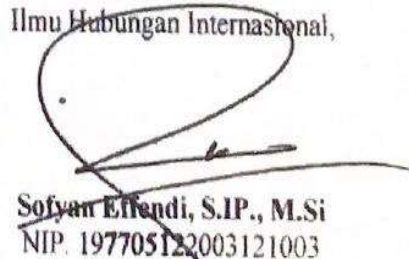
Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional,



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Chairul Ferdiant
NIM : 07041381823163
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 31 Agustus 2000
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Upaya Diplomasi Publik Indonesia di Fora Internasional
Terkait Isu Papua Merdeka

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, 6 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Chairul Ferdiant
NIM. 07041381823163

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini penulis persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam perjalanan hidup serta mendukung penulis yaitu Papa dan Mama. Kedua orang hebat tersebut membuat penulis percaya bahwa segala hal bisa dilakukan dengan niat yang tulus, menyakinkan penulis untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai, serta memberikan dukungan baik secara materi dan moral yang membuat penulis dapat menyelesaikan proses studi ini dengan baik. Penulis sangat berterima kasih atas nasihat, doa, saran dan semangat yang diberikan oleh kedua orang tua penulis”.

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan tentang diplomasi publik Indonesia di Fora Internasional sebagai upaya penyelesaian isu Papua Merdeka. Penulis menggunakan teori diplomasi publik yang dikemukakan oleh Mark Leonard. Dalam teori ini, terdapat tiga dimensi yang berperan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan diplomasi publik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi publik Indonesia untuk mempengaruhi Negara-negara di kawasan Pasifik Selatan melalui fora internasional terkait isu Papua merdeka masih belum berjalan dengan lancar, akibat belum maksimalnya implementasi diplomasi publik yang dilakukan Indonesia. Hal ini ditunjukkan melalui masih adanya dukungan yang diberikan oleh beberapa Negara Pasifik Selatan salah satunya Vanuatu yang tetap mendukung gerakan Papua Merdeka. Dapat dilihat dengan fakta bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mulai dari ekonomi dan infrastruktur belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan di Papua secara menyeluruh. Diplomasi publik Indonesia pada fora internasional masih didominasi oleh aktor-aktor negara seperti halnya pemerintahan, sedangkan untuk peran dari aktor non-negara seperti halnya aktivis, media, LSM dan lain-lain belum cukup untuk meningkatkan hubungan Indonesia dengan Papua. Maka dari itu untuk menyelesaikan permasalahan pada Papua, Indonesia masih mempunyai peluang jika mampu mengoptimalkan tiga dimensi diplomasi publik tersebut dan mengoordinasikan pelaksanaan diplomasi publik secara optimal, serta melibatkan lebih banyak aktor non-negara.

Kata kunci: Diplomasi Publik, Fora Internasional, Indonesia, Papua Merdeka, Aktor non-negara.

ABSTRACT

This research describes Indonesia's public diplomacy at the International Fora as an effort to resolve the issue of Free Papua. The author uses the theory of public diplomacy put forward by Mark Leonard. In this theory, there are three dimensions that act as indicators of the successful implementation of public diplomacy. The results of this study indicate that Indonesia's public diplomacy to influence countries in the South Pacific region through international fora related to the issue of an independent Papua is still not running smoothly, due to the not yet optimal implementation of public diplomacy by Indonesia. This is demonstrated by the continued support provided by several South Pacific countries, one of which is Vanuatu, which continues to support the Free Papua movement. This can be seen from the fact that the development carried out by the Indonesian government, starting from the economy and infrastructure, has not been sufficient to solve the problems in Papua as a whole. Indonesia's public diplomacy in international forums is still dominated by state actors such as the government, while the role of non-state actors such as activists, media, NGOs and others is not enough to improve relations between Indonesia and Papua. Therefore, to solve the problem in Papua, Indonesia still has a chance if it is able to optimize the three dimensions of public diplomacy and optimally coordinate the implementation of public diplomacy, and involve more non-state actors.

Key words: Public diplomacy, Internasional forum, Indonesia, Independent Papua, Non-state actors.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkat rahmat, karunia, serta bimbingan-Nya atas terlaksananya skripsi dari penulis ini dan juga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Upaya Diplomasi Publik Indonesia di Fora Internasional Terkait Isu Papua Merdeka”, tepat pada waktunya. Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat yang telah ditetapkan dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana di Universitas Sriwijaya Palembang.

Dalam proses penyusunan laporan penelitian ini penulis mendapatkan banyak bantuan dan penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak dan juga skripsi penulis ini juga jauh dari kata sempurna maka dari itu penulis juga mengharapkan arahan terbaik yang diberikan dari berbagai pihak untuk penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT., yang telah memberikan segala nikmat, berkat, rahmat, serta karunianya dalam hidup penulis
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulfikri Suleman, MA Selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi.

6. Bapak Ferdiansyah Rivai, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi.
7. Kepada Miss Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA dan Bapak Dr. Muhammad Yustian Yusa, S.S., M.S selaku Dosen Penguji saya yang sudah memberikan banyak saran dan masukan terhadap penulisan skripsi saya agar lebih baik.
8. Kepada Mba Anty selaku Admin Hubungan Internasional Palembang yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan administrasi kampus selama masa perkuliahan.
9. Kepada Bapak Kol. Willem Diaz V. S.IP., M.Si dan Ibu Octalira Safitrie, M. Sc selaku Pembimbing KKHI selama penulis melakukan kegiatan magang yang telah memberikan saran dan masukan untuk memulai penulisan skripsi.
10. Kepada kedua orang tua tercinta saya Anson Ferdiant Diem, ST., MT dan Raden Ayu Umi Kalsum, S.P., M.Si., kakek saya Prof. (emeritus) H. Diemroh Ihsan, M.A., Ph.D., nenek saya Prof. (emeritus) Hj. Chuzaimah Dahlan Diem, M.L.S., Ed.D., Hj. Nyayu Rogaya, kakak saya Maulidiyah Maghfirah Ferdianti, S.Tr.M dan adik saya Muhammad Arkan Ferdiant yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada saya selama menjalankan perkuliahan dan sampai kepada tahap penyusunan skripsi.
11. Rekan-rekan saya Aldi Pangestu Wiganda, S.Sos., Achmad Reyhan Noor Fadjri, M. Kedri Arya Arthallah, dan M. Bima Saputra yang selalu memberikan dukungan dan saran selama penulis membutuhkan bantuan dalam proses penyelesai skripsi.
12. Teman-teman angkatan 2018 Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya Palembang.

13. Pihak-pihak serta teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sudah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penyusunan skripsi.
14. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quit, I wanna thank me for just being me at all times.*

Akhir kata penulis berharap agar Allah SWT membalas kebaikan yang telah diberikan kepada semua pihak yang sudah membantu penulis selama proses penyelesaian skripsi ini. Dan juga penulis berharap agar skripsi ini berguna untuk para pembaca, khususnya untuk mahasiswa/i Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya Palembang.

Palembang, 1 Januari 2023

Muhammad Chairul Ferdiant

07041381823163

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Penelitian Terdahulu.....	8
2.2. Kerangka Konseptual.....	16
2.3. Argumen Utama.....	22
BAB III.....	24
METODE PENELITIAN.....	24
3.1. Desain penelitian.....	24
3.2. Definisi konsep.....	24
3.3. Fokus penelitian.....	26
3.4. Unit analisis.....	28
3.5. Jenis dan sumber data.....	29
3.5.1. Jenis Data.....	29
3.5.2. Sumber Data.....	29
3.6. Teknik pengumpulan data.....	30
3.7. Teknik keabsahan data.....	30
3.8. Teknik analisis data.....	31
BAB IV.....	32
DESKRIPSI/GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	32
4.1. Sejarah Konflik Papua.....	32

4.2 Persoalan Konflik Papua.....	34
4.3. Indonesia di Fora Internasional	38
BAB V.....	47
HASIL DAN PEMBAHASAN	47
5.1. Upaya Diplomasi Publik Indonesia Di Fora Internasional Terkait Isu Papua Merdeka	47
5.1.1 Manajemen Berita (<i>News Management</i>).....	53
5.1.2 Komunikasi Strategis (<i>Strategic Communication</i>)	57
5.1.3. Pembangunan Hubungan (<i>Relationship Building</i>).....	63
BAB VI.....	85
KESIMPULAN DAN SARAN	85
6.1. Kesimpulan	85
6.2. Saran	86
Bibliography	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 1.3. Fokus Penelitian.....	27
Tabel 3.9. Jadwal Penelitian	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.....	3
Gambar 5.1.....	67
Gambar 5.2.....	70
Gambar 5.4.....	75
Gambar 5.5.....	79
Gambar 5.6.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Diplomasi publik didefinisikan sebagai upaya untuk memajukan kepentingan nasional suatu negara dengan memahami, menginformasikan, dan mempengaruhi khalayak asing. Dengan kata lain, jika diplomasi tradisional berkembang melalui mekanisme *government to government relations*, maka praktik diplomasi publik akan lebih ditekankan pada *government to people*, atau bahkan *people to people*. Tujuannya adalah agar komunitas internasional memahami negara dengan baik sebagai basis sosial untuk hubungan dan kepentingan yang lebih luas.

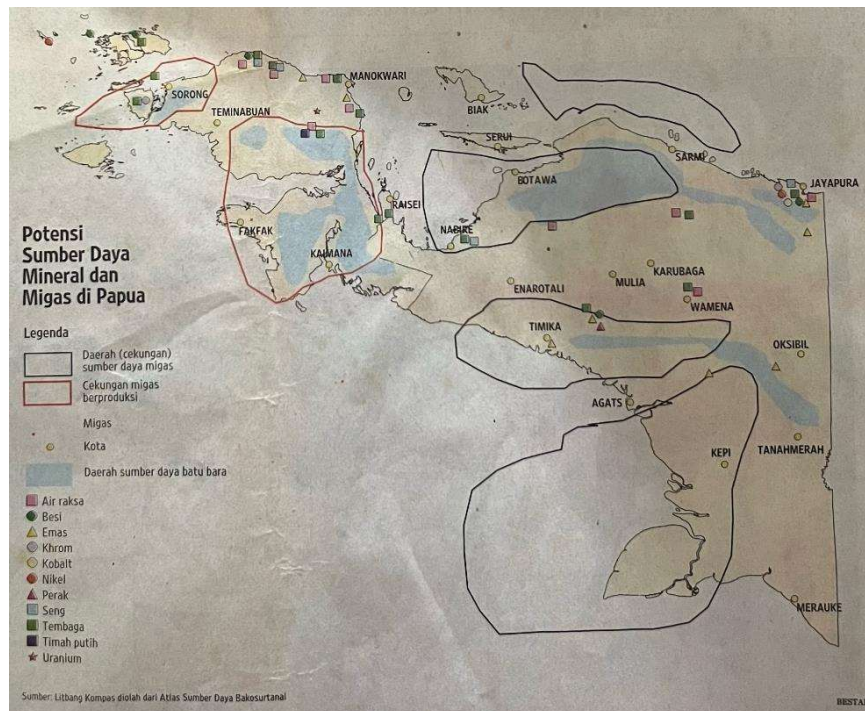
Dimensi publik sangat penting dalam perubahan dan mempengaruhi perilaku diplomasi. Sejauh ini, tidak ada kebijakan luar negeri atau inisiatif kebijakan internal yang dilakukan tanpa terlebih dahulu diperiksa oleh opini publik dan dimensi publik tidak hanya opini publik tetapi juga konsultasi publik, partisipasi dan tindakan. Perdebatan tentang diplomasi publik memiliki arti penting yang besar dan strategis untuk mengarahkan seluruh potensi bangsa pada satu kesatuan visi dan tujuan dalam memperjuangkan kepentingan bangsa dan Negara (Ma'mun, 2014).

Direktur Jenderal *Singapore International Foundation* (SIF) Jean Tan mengatakan bahwa diplomasi publik atau diplomasi rakyat adalah masa depan hubungan internasional karena dunia sekarang sudah saling terhubung. Semakin banyak individu, peneliti, pelaku bisnis, dan masyarakat sipil mulai angkat bicara dan bertindak atas isu-

isu di dunia yang berubah dengan cepat. Juga sangat baik ketika kelompok masyarakat membahas isu-isu yang masih di luar perhatian pemerintah (Tarigan, 2022).

Permasalahan domestik suatu negara yang sebelumnya bersifat sangat lokal, dapat berkembang menjadi permasalahan internasional atau dalam bahasa lain sering dibilang “*domestic issue are international issues*” (Sukma R. , 2006). Seperti isu Papua Merdeka, yang tidak lagi murni lokal (domestik). Hal ini sudah merajalela sehingga wajar dikatakan penyebab Papua Merdeka sudah mendunia. Perluasan dimensi ini tentu saja menjadikan pertanyaan ini sesuatu yang krusial. Mengingat hal tersebut dapat menimbulkan gangguan dari pihak luar (asing) sampai batas tertentu.

Papua Barat merupakan provinsi yang strategis bagi Indonesia. Papua Barat memiliki sumber daya alam seperti nikel, perak, air raksa, tembaga, emas dan bahan galian lainnya yang berkontribusi terhadap APBN Indonesia. Internasionalisasi di Papua Barat merupakan salah satu ancaman terhadap kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Munculnya dukungan eksternal memaksa Indonesia untuk bertindak lebih optimal agar pembebasan Timor Timur tidak terulang lagi dalam sejarah Indonesia (Chauvel, 2005).



Gambar 1.1

Sumber: Litbang Kompas diolah dari Atlas Sumber Daya Bakosurtanal

Papua resmi menjadi provinsi Indonesia pada tahun 1969 melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PAPERA) atau *Act of free choice*. Namun saat itu Papua Barat masih berada di bawah pemerintahan Provinsi Papua. Kemudian Sidang Umum PBB memutuskan hasil survei tersebut dan pada tanggal 19 November 1969, Papua resmi menjadi provinsi ke dua puluh tujuh Indonesia dan menjadi salah satu provinsi baru di Indonesia. Menurut Keputusan Pemerintah No. 24 Tahun 2007, yang dulunya bagian dari Provinsi Papua sekarang dikenal sebagai Provinsi Papua Barat. Namun, undang-undang otonomi khusus juga berlaku di Papua Barat dan Provinsi Papua.

Di sisi lain, hasil referendum menimbulkan kegemparan dari kelompok yang menginginkan Papua menjadi negara merdeka, tidak terikat dan bebas. Kelompok ini

menamakan dirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau *Free Papua Organization*. Organisasi Papua Merdeka lahir ketika salah satu daerah di Indonesia yaitu Papua dibicarakan tentang statusnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah konflik di Papua dimulai dengan penyatuan wilayah Papua menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya kelompok separatis Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia dilakukan dengan mengganggu stabilitas kedaulatan negara, misalnya. Pembakaran, tindak kriminal, penyerangan Mabes TNI/Polri hingga pembunuhan dengan beberapa kematian (Suwandi, 2020).

Banyak faktor yang menjelaskan munculnya separatisme di Papua, yaitu sejarah, kekecewaan masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat dalam menangani berbagai persoalan Papua, ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan politik, serta rasa terkucilkan dari sistem politik dan ekonomi. Kelompok tersebut menilai Konvensi New York dan PEPERA 1969 “cacat secara hukum” dan melanggar HAM rakyat Papua karena tidak dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan yaitu *one man one vote*, melainkan melalui sistem perwakilan. Kelompok separatis Papua yang sebelumnya bergerak secara acak dan tidak terkoordinasi, semakin solid dan terkonsolidasi dalam perkembangannya, seiring dengan tercapainya cita-cita memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri yang disebut *West Papua* (Papua Barat) (Halim, 2018).

Masalah ini semakin rumit karena globalisasi dan keterbukaan memberikan mereka yang terlibat mempunyai kebebasan untuk bergerak melintasi batas-batas negara. Banyak kelompok separatis di Papua berbincang tentang bagaimana membuat Papua merdeka tanpa melihat dan mempelajari seperti apa masalah di Papua. Salah satunya

adalah perlawanan kelompok separatis Papua yang semakin terkonsolidasi, seperti terlihat dari terbentuknya *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) yang mempertemukan kelompok-kelompok pejuang OPM antara kelompok bersenjata dan kelompok politik. Kehadiran ULMWP dimaksudkan untuk lebih mengoordinasikan upaya pembebasan Papua untuk mendapatkan dukungan politik dari dunia internasional (ULMWP, 2020).

Jalur perjuangan ULMWP sedikit berbeda dengan OPM yang menggunakan jalur pertempuran nasional atau lokal, sedangkan ULMWP melalui jalur internasional dan mengangkat isu-isu di Papua tentang isu HAM untuk mencari dukungan dari dunia internasional. Karena memperoleh kekuatan internasional hanya dimungkinkan melalui masalah hak asasi manusia (Sukoyo, 2020).

Isu kemerdekaan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dituntut oleh kelompok-kelompok pendukung gerakan Papua Merdeka tetap menjadi salah satu persoalan bangsa Indonesia yang prioritasnya adalah segera dicarikan solusi yang komprehensif dan bernilai. Sebab, persoalan kemerdekaan Papua tidak hanya berkembang di tingkat lokal dan nasional saat ini, tetapi juga telah menyentuh dimensi internasional. Hal ini merujuk pada reaksi sekelompok masyarakat internasional bahkan negara yang menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Papua, salah satunya Negara Vanuatu yang menegaskan dukungannya terhadap kemerdekaan Papua (Papuapost, 2014).

United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), yang mengklaim sebagai kendaraan politik bagi seluruh rakyat Papua, telah mengkampanyekan hal ini, meskipun beberapa di antaranya justru tampak berlawanan dengan intuisi. ULMWP bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari dua pertiga negara anggota PBB dan sejauh ini Vanuatu telah bertindak sebagai negara sponsor dengan dukungan dari beberapa negara sahabat di PBB. Alasan bias ini adalah karena Vanuatu percaya bahwa Indonesia telah memperlakukan Papua Barat dengan tidak adil. Mereka percaya bahwa Indonesia telah melakukan banyak pelanggaran terhadap Papua Barat, terutama pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu juga didasari oleh kesamaan budaya dengan masyarakat Papua Barat.

Indonesia memiliki tugas untuk melindungi kedaulatan bangsa dan negara dari setiap ancaman asing yang berusaha merusak kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan berbagai diplomasi publik di forum regional dan internasional. Diplomasi merupakan alat yang digunakan oleh suatu negara untuk mendapatkan keuntungan, dalam hal ini untuk mempertahankan kedaulatan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintah Indonesia juga terus melakukan diplomasi atau lobi dengan negara lain mengenai permasalahan di Papua dan meminta agar kelompok separatis Papua baik di dalam maupun di luar negeri tidak diberikan izin dan kesempatan untuk mendirikan negara sendiri. Hal ini dilakukan untuk mengukuhkan deklarasi internasional dalam mendukung keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seperti di

forum regional dan internasional seperti Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Forum *Melanesian Sparhead Group* (MSG) , *Pacific Islands Forum* (PIF) dan forum bilateral lainnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah penulis kemukakan diatas maka rumusan masalah yang didapatkan adalah **“Bagaimana Diplomasi Publik yang dilakukan oleh Indonesia di Fora Internasional terkait Isu Papua Merdeka?”**

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya-upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh Indonesia di fora internasional terkait isu Papua Merdeka.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini merupakan suatu Kajian Strategi yang memberikan suatu data maupun informasi dalam jurusan Ilmu Hubungan Internasional, untuk menambah wawasan tentang diplomasi, kebijakan luar negeri, khususnya dalam hal diplomasi publik yang dilakukan oleh Indonesia di fora internasional terkait isu Papua Merdeka.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan dalam pengembangan studi Ilmu Hubungan Internasional tentang diplomasi publik yang dilakukan oleh Indonesia di fora internasional terkait isu Papua Merdeka.

Bibliography

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2015, Oktober 28). *Festival Budaya Melanesia Dibuka*. Retrieved from kemdikbud.go.id:
<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2015/10/festival-budaya-melanesia-dibuka-4767-4767-4767>
- Abdurrahmat, F. (Jakarta). *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. 2011: Rineka Cipta.
- Adryamarthanino, V. (2021). *Kembalinya Indonesia ke PBB*. Jakarta: Kompas.com.
- Andreas Brian Bagaskoro Bayuseno, R. W. (2020). Memahami Konsistensi Sikap Politik Negara-Negara Melanesia mengenai Isu Papua di Forum-Forum Internasional. *Politica Vol. 11, No. 2*, 203-222.
- Arif Setriawan. (2016). KEBIJAKAN INDONESIA MEMBUKA HUBUNGAN DIPLOMATIK DENGAN NEGARANEGARA KAWASAN PASIFIK (TUVALU, NAURU, KIRIBATI). *JOM FISIP Vol.3, No.2*, 1-15.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Astuti, N. F. (2021). *Sejarah 27 September 1950: Indonesia Resmi Menjadi Anggota PBB KE-60*. Bandung: Merdeka.com.
- Baho, A. (2020, Agustus 15). *Pasca New York Agreement 15 Agustus 1962 "Jalan Panjang Musyawarah Mufakat Untuk Rakyat Papua"*. Retrieved from wartaplus.com:
<https://wartaplus.com/read/11190/Pasca-New-York-Agreement-15-Agustus-1962-Jalan-Panjang-Musyawah-Mufakat-Untuk-Rakyat-Papua>
- Cain, T. N. (2022, June 15). *The Melanesian Spearhead Group: What is it, and what does it do?* Retrieved from lowyinstitute.org: <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/melanesian-spearhead-group-what-it-and-what-does-it-do>
- Chauvel, R. (2005). *Indonesia-Australia: Tantangan dan Kesempatandalam Hubungan Politik Bilateral*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- CNN. (2021, Desember 15). *Ma'ruf Pesan ke Panglima Baru TNI agar Sikapi Papua dengan Humanis*. Retrieved from cnnindonesia.com:
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211106213729-20-717605/maruf-pesan-ke-panglima-baru-tni-agar-sikapipapua-dengan-humanis>
- CNNIndonesia. (2019). *Indonesia Respon Pernyataan Dua Negara soal Papuadi HAM PBB*. Jakarta: cnnindonesia.com.
- Dailypost. (2018, December 12). *MSG Secretariat attends 11th Democracy Forum in Indonesia*. Retrieved from dailypost.vu: <https://www.dailypost.vu/news/msg-secretariat-attends->

11th-democracy-forum-in-indonesia/article_ce5bd484-997f-5f88-9760-a7abc6ec7c89.html

- Dea. (2020, Desember 19). *Vanuatu, Negara Kecil yang Dukong Kemerdekaan Papua*. Retrieved from CNNINDONESIA.COM: <https://www.cnnindonesia.com/al/20200928075602-113-551633/vanuatu-negara-kecil-yangdukong-kemerdekaan-papua>
- Dewangga, S. (2014, Januari 22). *Makna Strategis Kunjungan Para Menlu Melanesia bagi Integrasi Papua*. Retrieved from detikNews: <https://news.detik.com/kolom/d-2474434/makna-strategis-kunjungan-para-menlu-melanesia-bagi-integrasi-papua>
- Didit Susiyanto, S. M. (2016, Februari 4). *trimongalah.wordpress.com*. Retrieved from Wordpress: <https://trimongalah.wordpress.com/2016/02/04/pembangunan-dan-pendekatan-budaya-sebagai-basis-diplomasi-masalah-papua/>
- Direktorat Pengolahan Arsip Nasional RI. (2016, Desember 1). *GUIDE ARSIP PERJUANGAN PEMBEBASAN IRIAN BARAT 1949-1969*. Retrieved from Guide Arsip Perjuangan Pembebasan Irian Barat 1949-1969: <https://anri.go.id>
- Djelantik, S. (2008). *Diplomasi antara teori dan praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Drs. Berlian Helmy, M. (2019). Mematahkan Dukungan Vanuatu Terhadap Gerakan ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) Guna Menegakkan Kedaulatan NKRI. *JURNAL KAJIAN LEMHANNAS RI, EDISI 38, 21-27*.
- Elisabeth, A. (2006). Dimensi Internasional Kasus Papua. *Jurnal Penelitian Politik Vol 3, No 1, 43-65*.
- Elmslie, J. (2002). *Irian Jaya under the Gun: Indonesian Economic Development versus West Papuan Nationalism*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Fadhilah, M. (2019). Inkonsistensi Kebijakan Luar Negeri Melanesia Spearhead Group (MSG) dalam isu Papua Barat: Sru di Kasus Fiji dan Papua Nugini. *Indonesian Perspective, Vol. 4, No. 1, 59-81*.
- Firmansyah, T. (2020, Februari 15). *MSG Tolak Keinginan Separatis Papua Jadi Anggota Penuh*. Retrieved from republika.co.id: <https://republika.co.id/berita/internasional/asia/18/02/15/p470gj377-msg-tolak-keinginan-separatis-papua-jadi-anggota-penuh>
- Halim, A. (2018). Separatisme Papua adalah musuh. *Journal of West Pacific, 201-220*.
- Hartati, A. Y. (2010). SEPARATISME DALAM KONTEKS GLOBAL (STUDI TENTANG EKSISTENSI REPUBLIK MALUKU SELATAN (RMS) SEBAGAI GERAKAN SEPARATIS INDONESIA). *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional Vol. 7, No. 2, 1-10*.
- Hartati, T. (2010). *Pendidikan bahasa dan sastra di kelas rendah*. Bandung: UPI Press.

- Hasyim, M. M. (2017). *Diplomasi Indonesia dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) terhadap Penjagaan Kedaulatan NKRI di Papua Barat Periode 2013-2016*. Tangerang: Skripsi: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah.
- Hennida, C. (2009). Diplomasi Publik dalam Politik Luar Negeri. *Journal Unair: Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 1-12.
- Ibnu Gozali. (2020, Januari 10). *Pembangunan PLBN Terpadu Skouw Dukong Geliat Ekonomi Kawasan Perbatasan Indonesia-Papua Nugini*. Retrieved from PORTONEWS: <https://www.portonews.com/2020/laporan-utama/pembangunan-plbn-terpadu-skouw-dukung-geliat-ekonomi-kawasan-perbatasan-indonesia-papua-nugini/>
- Kementerian Luar Negeri RI. (2019, August 14). *Indonesia Channel: Mosaic of Indonesia” Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) 2019*. Retrieved from kemlu.go.id: <https://kemlu.go.id/portal/i/read/527/berita/indonesia-channel-mosaic-of-indonesia-beasiswa-seni-dan-budaya-indonesia-bsbi-2019>
- Kementerian Luar Negeri RI. (2019, August 16). *Indonesia Perkuat Kerja Sama Perubahan Iklim dengan Pasifik pada KTT PIF ke-50 di Tuvalu*. Retrieved from KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/533/berita/indonesia-perkuat-kerja-sama-perubahan-iklim-dengan-pasifik-pada-ktt-pif-ke-50-di-tuvalu>
- Kementerian Luar Negeri RI. (2019, April 8). *Pacific Island Forum (PIF)*. Retrieved from kemlu.go.id: https://kemlu.go.id/portal/id/read/132/halaman_list_lainnya/pacific-island-forum-pif
- Kementerian Luar Negeri RI. (2019, Juli 6). *Perkuat Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan, Kemlu Adakan Jaring Masukan Daerah di Papua*. Retrieved from kemlu.go.id: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/438/berita/perkuat-koordinasi-dengan-pemangku-kepentingan-kemlu-adakan-jaring-masukan-daerah-di-papua>
- Kementerian Luar Negeri RI. (2022, June 7). *Kelompok Kerja Strategi Keamanan Regional Melanesian Spearhead Group Ke-4 Bali, 6 -10 Juni 2022*. Retrieved from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3667/berita/kelompok-kerja-strategi-keamanan-regional-melanesian-spearhead-group-ke-4-bali-6-10-juni-2022>
- Kementerian Luar Negeri RI. (2022, November 13). *Press Release Dewan HAM PBB Adopsi Laporan Indonesia pada Siklus ke-4 Universal Periodic Review*. Retrieved from kemlu.go.id: https://kemlu.go.id/portal/id/read/4139/siaran_pers/press-release-dewan-ham-pbb-adopsi-laporan-indonesia-pada-siklus-ke-4-universal-periodic-review
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2015, Oktober 30). *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan*. Retrieved from

- kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbbali:
<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbbali/festival-budaya-melanesia-2015/>
- Khoiriyah, N. F. (2019). *Strategi Diplomasi Komersial Indonesia dalam Bidang Ekonomi Digital Melalui Next Indonesia Unicorn (NextICorn) Tahun 2017-2019*. Surabaya: digilib.uinsby.ac.id.
- Komisi I RI. (2022, April 6). *Permasalahan Papua Perlu Disikapi dengan Tegas*. Retrieved from dpr.go.id:
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38483/t/Permasalahan+Papua+Perlu+Disikapi+dengan+Tegas>
- Kurnia, M. (2016). THE INDONESIAN ARTS AND CULTURE SCHOLARSHIP AS AN INSTRUMENTALITY OF CULTURAL DIPLOMACY INDONESIA. *Transformasi No.29, Vol. 1*, 35-40.
- Leonard, M. (2002). Diplomacy by Other Means. *Foreign Policy*, 48-56.
- Liland, Z. (2019). *Indonesia Protes Vanuatu Ikutkan Benny Wenda di Forum Pasifik*. Jakarta: detikNews.
- Ma'mun, A. S. (2014, April 29). *DIPLOMASI PUBLIK DALAM MEMBANGUN CITRANEGARA*. Retrieved from www.esaunggul.ac.id: <http://www.esaunggul.ac.id/article/diplomasi-publik-dalam-membangun-citra-negara/>
- McDowell, M. (2018, December 20). *International IDEA at the Bali Democracy Forum*. Retrieved from International IDEA: <https://www.idea.int/news-media/news/international-idea-bali-democracy-forum>
- Mellisen, J. (2006). *Public Diplomacy Between Theory and Practice*. California: Rand Corporation.
- Michel Kosteci, O. N. (2007). *Commercial Diplomacy and International Business*. Den Haag: Netherlands Institute of International Relations : Clingendael.
- Muhammad Ilman Na'fian. (2021). *Mengapa Konflik di Papua Tak Kunjung Usai?* Jakarta: IDN TIMES.
- Muridan S. Widjojo, A. E. (2010). *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Nicolson, S. H. (1988). *Diplomacy*. Washington DC: Institute for the Study of Diplomacy.
- Nurika, R. R. (2015). *Peran Diplomasi Komersial dalam Pengembangan Industri Smelter Bauksit di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Nurika, R. R. (2017). Peran Globalisasi di Balik Munculnya Tantangan Baru Bagi Diplomasi di Era Kontemporer. *Jurnal Sospol, Vol. 3, No.1*, 126-141.

- osnipa.com. (2022). *Salah satu faktor yang mendorong pemerintah Indonesia memilih keluar sebagai anggota PBB pada 7 Januari 1965 adalah...* Jakarta: osnipa.com.
- Papuapost. (2014). *PM Vanuatu, Kami Mendukung Gerakan Kemerdekaan Rakyat Papua Barat*. Papua: Papuapost.com.
- Pemerintah Provinsi Bali. (2021, December 9). *Gubernur Koster Hadiri Pembukaan Bali Democracy Forum ke-14 tahun 2021*. Retrieved from baliprov.go.id: <https://www.baliprov.go.id/web/gubernur-koster-hadiri-pembukaan-bali-democracy-forum-ke-14-tahun-2021/>
- Perkasa, V. D. (2009). Aspek Kultural, Kepemimpinan Tradisional, dan Krisis Tata Pemerintahan di Wamena, Papua. *Analisis CSIS, Vol 38, No.1*, 81-90.
- Permana, R. H. (2020). *Lengkap, Ini Jawaban Tega Silwany Pasaribu untuk Vanuatu di Sidang PBB*. Jakarta: detikNews.
- Pribadi, R. E. (2017). Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Papua. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional V(3)*, 928-929.
- Puguh Santoso, A. P. (2022). Upaya Indonesia Mencegah Konflik Papua dengan Pendekatan Mediasi Humanistik. *Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 16, Nomor 2*, 149-156.
- Putri, T. H. (2021). *Stafsus Jokowi Billy Ungkap Penyebab Konflik di Papua Tak Kunjung Usai*. Jakarta: IDN TIMES.
- Rahman, V. E. (2022). *Isu Papua Lagi-lagi Dibahas di Sidang Umum PBB, Kemlu: Biarkan saja!* Jakarta: IDN TIMES.
- Reba, Y. E. (2009). Good Governance dan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan di Papua. *Analisis CSIS, Vol 38, No.1*, 54-68.
- Richard Chauvel et.al. (2005). *Indonesia-Australia: Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rizqo, K. A. (2021). *Jokowi Resmi Teken UU Nomor 2/2021 tentang Otsus Papua*. Jakarta: detiknews.
- Rohidi, T. R. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-PRESS).
- Sabir, A. (2018). Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua. *Jurnal Hubungan Internasional, Tahun XI, No.1*, 91-108.
- Sadeli, H. (2021). *Vanuatu dan Sentimen Anti-Indonesia*. Jakarta: Kompas.com.
- Santarita, J. B. (2002). Southwest Pacific Dialogue: Indonesia's Newest Leverage in the Asia Pacific. *ASIAN STUDIES, Vol. 38, Number 2*, 121-135.

- Satriawan, A. (2016, Oktober). Kebijakan Indonesia Membuka Hubungan Diplomatik Dengan Negara-Negara Kawasan Pasifik (Tuvalu, Nauru, Kiribati). *JOM FISIP Vol.3 No.2*, 1-15. Retrieved from media.neliti.com.
- Sihombing, E. C. (2018). *KTT MSG Ke-21 Kembali Tolak Aplikasi Kelompok Separatisme*. Port Moresby: beritasatu.com.
- Siregar, L. P. (2017). *Klaim bahwa petisi referendum Papua 'sudah diserahkan kepada PBB di New York' dibantah*. Jakarta: bbc.com.
- Sugiono, B. (2009). Problematika Masyarakat Sipil dan "Good Governance" di Papua. *Analisis CSIS, Vol38, No. 1*, 69-80.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sukma, R. (2006, Juli 13). *POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA - ELIB UNIKOM*. Retrieved from elib.unikom.ac.id: <https://elib.unikom.ac.id>
- Sukoyo, Y. (2020). *Kontribusi Kelompok Separatis untuk Masyarakat Papua Dipertanyakan*. Jakarta: Beritasatu.com.
- Sutiono. (2008). *Speeches and Proceedings Bali Democracy Forum "Building and Consolidating Democracy: a Strategic Agenda for Asia"*. Bali: Department of Foreign Affairs Republic of Indonesia.
- Suwandi, D. (2020). *Perkembangan KKB di Papua, Kapolda: Tersisa Tujuh Kelompok yang Masih Aktif*. Jayapura: Kompas.com.
- Tarigan, M. (2022). *Mengapa Diplomasi Publik Berperan Penting dalam Membentuk Perdamaian?* Jakarta: Tempo.co.
- Theo P.A. Van den Broek ofm, J. B. (2001). *Memoria Passionis di Papua*. Jakarta: Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura.
- ULMWP. (2020, Desember 9). Retrieved from *ULMWP.org*. Retrieved from ULMWP: <https://www.ulmwp.org/ulmwp>
- Vivanews.com. (2012, Agustus 7). *Mimp Indonesia: Kiblat Fashion Muslim Dunia*. Retrieved from kemenperin.go.id: <https://kemenperin.go.id/artikel/4051/Mimpi-Indonesia:-Kiblat-Fashion-Muslim-Dunia>
- Wang, J. (2006). Public Diplomacy and Global Business. *The Journal of Business Strategy*, 49-58.
- Wanggai, V. (2022). *Masa Depan Pasifik Selatan: antara Kompetisi Geostrategis dan Kekuatan Keluarga Pasifik*. Melbourne: The Global Review.
- Wardhani, B. (2020). *Apa dampak diplomasi bantuan Indonesia ke kawasan Pasifik?* Jakarta: theconversation.com.

- Winartha, I. M. (2006). *Metedologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: C.V. Andi Offset.
- Yani, A. A. (2017). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Yanwardhana, E. (2021). *Kronologi Vanuatu Serang RI di PBB & Sebut-sebut Papua*. Jakarta: CNBC Indonesia.
- Yuniarto, T. (2022). *Bali Democracy Forum: Mewujudkan Perdamaian, Demokrasi, dan Stabilitas Kawasan*. Jakarta: kompas.id.
- Yunita, L. (2021). Kebijakan Luar Negeri Indonesia Sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB Periode 2019-2020. *JOM FISIP Vol. 8*, 1-15.